

STEREOTIPE, PRASANGKA DAN DINAMIKA ANTARETNIK

STEREOTYPES, PREJUDICE AND DYNAMICS OF INTER-ETHNIC

Ilyas Lampe

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Tadulako
Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Palu. Telp. (0451) 422611
Email: ilyaslampe7@gmail.com

Haslinda B. Anriani

Program Studi Sosiologi, Fisip, Universitas Tadulako)
Jl. Soekarno Hatta Km. 9, mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Telp. (0451) 422355

diterima: 6 Mei 2016 | direvisi: 14 Juni 2016 | disetujui: 12 Juni 2016

ABSTRACT

Ethnic identity is a differentiator that is primordial that is often used to establish an association to a particular group, as ingroup or outgroup that in the local context the plural is called the "Kitorang" or "kamorang". Ethnic identity is a true socio-cultural construction, which can be changed, uncertain and impermanent. Ethnicity is an expression of past products, the rise of the same origin, social relations, and similarities in cultural values and traits such as language and religion. However, despite ethnic identity can change it may cause birth stereotypes and prejudices even turn into violent conflict. This research is to unravel the relationship between ethnic Kaili (native) and ethnic Bugis (entrants) in the city of Palu. This study used a qualitative method with informants selected from academia (anthropologist), students and community leaders Kaili and Bugis. The results showed that the various stereotypes that appear in both ethnically both positive and negative. Meanwhile there are also prejudices that accompany the relationship and communication between the two ethnic groups, although there has been a cultural and economic interconnections since hundreds of years ago. Even since the 1990s until recent year violent conflicts ethnic background, whose roots are suspected due to economic disparities between Kaili and Bugis ethnic population, such as the conflict in the Market Masomba and Inpres Market.

Keywords: *Prejudice, Stereotype, Ethnic Identity, Intercultural Communication.*

ABSTRAK

Identitas etnik merupakan pembeda yang bersifat primordial yang seringkali digunakan untuk menetapkan asosiasi pada kelompok tertentu, sebagai *ingroup* atau *outgroup* yang dalam konteks lokal jamak disebut dengan istilah "kitorang" atau "kamorang". Identitas etnik sejatinya merupakan konstruksi sosial budaya, yang dapat berubah, tidak pasti dan tidak kekal. Etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial, dan kesamaan dalam nilai-nilai budaya dan ciri-ciri seperti bahasa dan agama. Namun identitas etnik kendati dapat berubah ia dapat menyebabkan lahirnya stereotipe dan prasangka bahkan berubah menjadi konflik kekerasan. Penelitian ini mengurai relasi antara etnik Kaili (pribumi) dan Etnik Bugis (pendatang) di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang dipilih dari kalangan akademisi (antropolog), mahasiswa dan tokoh masyarakat Kaili dan Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beragam stereotipe yang muncul pada kedua etnik baik yang positif maupun negatif. Sementara itu masih terdapat pula prasangka yang menyertai relasi dan komunikasi antar kedua etnik, kendati telah terjadi persinggungan budaya dan ekonomi sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan sejak tahun 1990 an hingga beberapa tahun terakhir terjadi konflik kekerasan berlatarbelakang etnik, yang akarnya ditengarai akibat ketimpangan ekonomi antara penduduk etnik Kaili dan Bugis, misalnya saja konflik di Pasar Masomba dan Pasar Inpres.

Kata kunci: Prasangka, Stereotipe, Identitas Etnik, Komunikasi Antarbudaya

I. PENDAHULUAN

Identitas etnik, agama, relasi sosial dan komunikasi hampir-hampir sulit dipisahkan. Hal ini juga berarti bahwa keberagaman seseorang lebih banyak dipengaruhi keturunan dan lingkungan, bukannya pilihan bebas. Tempat lahir, warna kulit, bahasa, dan agama merupakan realitas primordial yang diterima seseorang, bukan karena hasil usahanya sendiri. Begitu pun hubungan kekerabatan, dan faham keagamaan sangat signifikan pengaruhnya. Misalnya saja, meski tidak selalu taat menjalankan ajaran agama, para imigran Turki di Eropa jika ditanya agamanya pasti menjawab Islam. *"I am Turk, therefore I am a Moslem"*. Begitu pun warga Melayu di Malaysia, kalau tidak beragama Islam akan dianggap khianat terhadap identitas etniknya. Penduduk Mindanao Selatan pun demikian. Mereka kurang nyaman dianggap sebagai orang Filipina karena asosiasi Filipina adalah Katolik, sedangkan Mindanao adalah Islam dan adakalanya disebut bangsa Moro. Orang Thailand merasa identik dengan Buddha, sedangkan penduduk Patani yang berada di selatan selalu berusaha mempertahankan identitas keislamannya (Hidayat, 2006; dalam Lampe, 2010).

Dalam konteks Indonesia, misalnya orang Manado adalah Protestan, sedangkan orang Bali adalah Hindu. Orang Sunda kalau tidak memeluk Islam dianggap aneh. Tentu saja ini bukan kemestian teologis, melainkan lebih merupakan ikatan tradisi keluarga dan masyarakat yang sudah berakar kuat sehingga siapa pun yang terlahir dalam lingkungan tersebut sulit untuk keluar dari identitas itu.

Identifikasi identitas etnik sebagaimana lazim dilakukan pada masyarakat yang multietnik senantiasa diarahkan pada situasi dan konteks

dimana seseorang berada. Dalam konteks komunikasi lintasbudaya pada daerah multietnik identifikasi identitas etnik menjadi kemestian dalam aktifitas, peran maupun dalam kehidupan sosial secara umum. Keadaan ini sesuai dengan Fredrik Barth (Mulyana, 2006) yang menyebutnya sebagai *situational ethnicity*.

Banyak ahli menganggap bahwa identitas budaya merupakan sebuah konstruksi sosial. Etnisitas merupakan ekspresi dari produk masa lalu, kebangkitan asal-usul yang sama, hubungan sosial, dan kesamaan dalam nilai-nilai budaya dan ciri-ciri seperti bahasa dan agama. Namun, dimensi sejarah tentang identitas menunjukkan bahwa identitas itu tidak pasti, tidak konstan, dan kekal, tetapi kadang berubah dan dapat dibentuk atau dikonstruksi, (King dan Wilder, 2003 dalam Maunati, 2007). Dalam proses pembentukan identitas itu, kekuasaan sering berperan. Misalnya saja kekuasaan Barat berperan penting dalam pembentukan identitas, baik melalui peran ilmuwan sosial dan misionari. Selain itu, berbagai kelompok juga sering berperan dalam pembentukan identitas, misalnya kaum intelektual, birokrat, kelompok elit dan penguasa. Identitas budaya tertentu sering diposisikan dengan kelompok lainnya. Dayak misalnya, diposisikan dengan Islam, artinya Dayak adalah non-Islam. Misalnya saja, orang-orang yang semula Dayak menjadi masuk Melayu ketika mereka beralih ke agama Islam (Maunati, 2007).

Perbedaan identitas etnik inilah yang lalu melahirkan stereotipe, prasangka bahkan menjadi sumber konflik kekerasan antaretnik. Sesuatu yang jamak terjadi di Indonesia. Prasangka menurut Allport (Liliweri, 2005) adalah sikap antipati yang berlandaskan pada cara menggeneralisasi yang salah

dan tidak fleksibel. Prasangka merupakan sikap negatif yang diarahkan kepada seseorang atas dasar perbandingan dengan kelompok sendiri. Secara umum, prasangka etnik merupakan sikap negatif yang diarahkan oleh kelompok etnik tertentu kepada kelompok etnik lainnya dan difokuskan pada ciri-ciri negatif sehingga menghambat hubungan antaretnik.

Sementara itu menurut Samovar & Porter (Mulyana, 2006) stereotip adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Sedangkan menurut Matsumoto (Liliweri, 2005) stereotip adalah generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang terutama karakter psikologis atau sifat kepribadian.

Dinamika relasi sosial di kota-kota yang multietnik seringkali dihiasi oleh konflik sosial bernuansa kekerasan sektarian yang dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas etnik atau menggunakan identitas etnik sebagai upaya membangun solidaritas untuk meningkatkan keserempakan dan dukungan kekuatan dalam konflik yang terjadi. Sebagai misal, dapat disebutkan bagaimana identitas pendatang Bugis di Poso menjadi identitas etnik yang di angkat sebagai ciri pembeda bagi kelompok lain yang dianggap berbeda. Bugis yang jumlahnya hanya kurang 5 % dari populasi Kabupaten Poso saat itu dijadikan pembeda bagi komunitas lokal, Pamona yang mayoritas dan kebetulan berbeda secara agama yang mayoritas Kristen. Jadilah etnis Bugis sebagai identitas yang menonjol sebagai salah satu pelaku utama konflik Poso, padahal komunitas Muslim yang bermukim di Poso dengan populasi lebih besar seperti Jawa, Gorontalo dan Tojo tidak begitu menonjol (Nordholt, 2007).

Dinamika yang terjadi di Kabupaten Poso (220 km dari Kota Palu) berbeda dengan apa yang terjadi di Kota Palu, tempat di mana riset ini dilaksanakan tetapi Kota Palu sebagai ibukota propinsi memiliki dinamika sosial dan konflik yang kompleks. Konflik yang terjadi di Kota Palu lebih banyak berlatarbelakang konflik antar kelurahan, antar kampung dan juga ketegangan antaretnis dan tidak bernuansa agama sebagaimana yang terjadi di Poso.

Kota Palu adalah ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, kota dengan tingkat keberagaman penduduk tinggi. Di lihat dari ragam etnik, penduduk Kota Palu terdiri dari 16 etnik pemukim pertama (asli) dan 14 etnik sebagai penduduk pemukim susulan (pendatang), dengan ragam bahasa 14 bahasa penduduk asli dengan 70 ragam dialek (Aragon, 2000). Mereka adalah bagian komunitas yang merupakan representasi masyarakat yang berasal dari 12 kabupaten dan 1 (satu) kota.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk menelusuri aspek-aspek stereotipe dan prasangka antaretnik serta konflik yang terjadi antara dua etnis paling besar populasinya di Kota Palu. Pemilihan dua etnis tersebut mengingat kontestasi antardua etnis, Bugis dan Kaili sudah menjadi isu yang santer terdengar terutama terkait persaingan pada aspek ekonomi, politik dan birokrasi serta sosial budaya. Bugis dengan identitas sebagai pendatang, (sebagian merupakan keturunan sudah bermukim di Kota Palu sejak ratusan tahun sebelumnya) dan Kaili sebagai etnis asli (dengan berbagai subetnik). Oleh karenanya masalah penelitian yang akan dielaborasi lebih jauh adalah; 1). bagaimana stereoptipe antara etnik Bugis dan etnik Kaili dalam interaksi antarbudaya di Kota Palu?. 2) Bagaimana prasangka yang terjadi antara etnik Bugis dan Kaili dalam

interaksi antarbudaya di Kota Palu? 3). Sejauhmana konflik-konflik yang terjadi antarkedua etnik dalam interaksi dan komunikasi di Kota Palu?.

Pengalaman interaksi lintasbudaya yang melibatkan begitu banyak warna kulit (ras), etnis, bahasa ibu, agama dan tentu saja negara bangsa selalu saja menjadi menarik jika dikaitkan dengan identitas etnis atau etnosentrisme masing-masing. Beragam identitas etnik tersebut menjadi sumber stereotipe yang muncul dalam relasi antaretnik dimasyarakat. Judd (dalam Wade & Tavris, 2007 : 312) mengatakan bahwa stereotip merefleksikan perbedaan antar orang, dan mereka juga mendistorsikan kenyataan dalam tiga cara. *Pertama*, mereka melebih-lebihkan perbedaan antar kelompok, membuat kelompok yang distereotipkan terlihat aneh, asing, atau berbahaya tidak seperti “kami”. *Kedua*, mereka menghasilkan persepsi selektif, orang-orang cenderung untuk melihat bukti-bukti yang sesuai dengan stereotip dan menolak adanya persepsi yang tidak sesuai dengan stereotip. *Ketiga*, mereka mengabaikan perbedaan masing-masing anggota dalam kelompok asing ini. Stereotip menciptakan kesan bahwa setiap anggota kelompok tersebut pastilah sama.

Menurut Samovar dan Porter (2014) ada empat alasan mengapa stereotipe menghambat komunikasi antarbudaya. *Pertama*, stereotipe merupakan sejenis penyaring, menyediakan informasi yang konsisten dengan informasi yang dipercayai oleh seseorang. *Kedua*, bukan pengelompokan yang mengganggu komunikasi tetapi asumsi yang bahwa semua informasi spesifik mengenai suatu budaya diterapkan pada semua orang dari kelompok tertentu. *Ketiga*, stereotipe menghalangi keberhasilan komunikasi karena stereotipe biasanya berlebih-lebihan, terlalu

seederhana dan menyamaratakan. *Keempat*, stereotipe jarang berubah, karena stereotipe biasanya berkembang sejak awal kehidupan dan terus berulang dan diperkuat dalam suatu kelompok.

Prasangka etnik adalah antipasti berdasarkan generalisasi yang salah atau tidak fleksibel. Prasangka bisa dirasakan atau diekspresikan, bisa diarahkan terhadap kelompok secara keseluruhan atau terhadap seseorang karena ia merupakan anggota kelompok dimaksud (Allport, 1954; dalam Brown, 2005) . Sementara menurut Jones (dalam Brown, 2005) prasangka etnik adalah penilaian yang sudah ada sebelumnya mengenai anggota ras, agama atau pemeran social signifikan lain yang dipegang dengan tidak mempedulikan fakta yang berlawanan dengan itu.

Prasangka menurut Brown (2005:14) merupakan tiga hal yang saling berkaitan diantaranya: *Pertama*, prasangka merupakan orientasi kearah seluruh kategori orang-orang dan bukan kearah individu orang per orang. Bahkan bila targetnya secara konkrit adalah individu tunggal, karakteristik individual orang itu dianggap jauh kurang penting dibandingkan cap yang digunakan untuk mengalokasikannya ke dalam kelompok tertentu dan bukan kelompok lainnya, berdasarkan aksen, nama, warna kulit dan lain-lainnya. *Kedua*, mengapa prasangka dianggap sebagai sebuah proses kelompok karena prasangka paling sering berupa orientasi yang secara social sama. Artinya sejumlah besar orang di segmen masyarakat tertentu secara umum menyepakati stereotipe negative terhadap kelompok luar tertentu dan akan bertindak dengan cara yang sama terhadap mereka. *Ketiga*, sejauh ini prasangka biasanya di arahkan pada kelompok tertentu oleh kelompok lain.

Merujuk pada definisi di atas, kita tidak perlu heran jika menemukan bahwa hubungan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat memainkan peran penting dalam determinannya. Hubungan-hubungan antarkelompok dalam bentuk konflik dapat saja muncul sejauh menyangkut sumberdaya yang terbatas, dominasi kekuasaan antara satu kelompok kepada kelompok lainnya, disparitas numerik dalam konteks status ekonomi yang kesemuanya berimplikasi krusial terhadap arah, tingkat dan intensitas prasangka yang akan diperlihatkan.

Etnisitas adalah sebuah konsep kultural yang berpusat pada pembagian norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, simbol, praktik-praktik kultural dan konservatisme dalam organisasi hubungan sosial (Armstrong, 1986:104). Formasi kelompok etnik menyandarkan dirinya pada pembagian entitas kultural yang dibangun di bawah konteks sejarah, sosial, dan politik khusus yang mendorong perasaan saling memiliki dan menciptakan mitos-mitos leluhur. Etnisitas mewujud dalam bagaimana cara kita berbicara tentang identitas kelompok, tanda-tanda dan simbol-simbol yang kita pakai mengidentifikasi kelompok. Dengan demikian konsep etnisitas bersifat relasional, berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai bukan kita; orang Bugis bukan orang Kaili, Sunda bukan Jawa dan sebagainya. Konsekuensinya, etnisitas dipahami lebih baik sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik (Barth, 1988)

Konsepsi kulturalis tentang etnik merupakan sebuah usaha yang berani untuk melepaskan diri dari implikasi rasis yang inheren dalam sejarah konsep

ras. Seperti yang dinyatakan Isaacs (1993:42), term etnisitas mengakui kedudukan sejarah, bahasa, dan kebudayaan dalam konstruksi subyektifitas dan identitas, seperti halnya fakta bahwa semua wacana selalu punya tempat, posisi, situasi dan semua pengetahuan selalu kontekstual. Eriksen (1993:16) memberikan batasan, etnisitas biasanya dibatasi oleh *minority issues and race relations*, yaitu kelompok minoritas dan hubungan ras, dan keduanya saling berhubungan. Seperti pendapat Berry (dalam Susiyanto, 2006) yang lebih menekankan kepada perbedaan berdasarkan hubungan dan karakteristik kelompok yaitu;

Pertama, sebagai suatu kelompok terdapat sejumlah individu yang dapat dikenal, biasanya secara sosial berinteraksi dan melestarikan diri dari waktu ke waktu. Terdapat sistem sosial dan norma-norma yang mengatur perilaku para anggota kelompok. *Kedua*, menjadi kelompok etnik karena karakteristik yang dimiliki. Terdapat dua aspek yang muncul; yang pertama hal yang bersifat sanding obyektif (*objective facet*), karena hubungan darah yang selanjutnya menjadi keturunan darah dan keturunan sempalan. Keturunan biologis biasanya dapat dikaji menjadi kelompok etnokultural yang menunjukkan hal, seperti makanan, pakaian, bahasa dan agama. Pada perkembangan selanjutnya bukan menunjukkan budaya asli yang persis sama, tetapi bersifat derivative bahwa versi budaya saling dimodifikasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, hal yang bersifat subyektif, yang menunjukkan karakter tentang jatidiri atau kelekatan terhadap kelompok.

II. METODE PENELITIAN (Style E1. Bab)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi dalam mengungkapkan makna sebagaimana informan pahami, rasakan dan alami. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi yang terserak dari berbagai sumber seperti koran dan manuskrip penelitian. Meskipun demikian disadari bahwa penelitian ini memiliki limitasi yang patut diketengahkan diantaranya soal waktu pengumpulan data dan analisis data penelitian yang relatif singkat. Informan penelitian ditetapkan secara purposif, yaitu; akademisi (antropolog), mahasiswa dari kedua etnis dan tokoh masyarakat Kaili dan Bugis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (Style E1. Bab)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Kota Palu adalah Kota dengan komposisi etnik yang sangat beragam dengan 2 (dua) etnis mayoritas yaitu etnik Bugis dan Kaili. Meskipun jika ditelusuri kedua etnik tersebut masih memiliki sub-sub etnik yang berbeda. Misalnya etnik Bugis terdiri dari sub etnik To Luwu dan Massanrempulu, meski di daerah asal kedua sub etnik tersebut seringkali menolak dikategorikan sebagai etnik Bugis, tetapi dalam konteks Kota Palu keduanya dikategorikan sebagai orang Bugis. Sementara itu etnik Kaili yang mendiami lembah Palu terdiri dari Sub Etnik Ledo, Unde, Rai dan Daa. Masing-masing subetnik memiliki dialek bahasa Kaili yang berbeda dan bahkan tingkat kesamaan bahasanya kadang relatif kecil.

Komposisi penduduk berdasarkan etnik di Kota Palu berdasarkan sensus 2000 terdiri dari Kaili 33,3%, Bugis 24,4%, Jawa 10,1%, Bali 1,2%,

Gorontalo 3,1% dan Lainnya 24,9% (Suryadinata, 2003). Presentasi etnik lainnya yang berjumlah 24,9% adalah jumlah yang signifikan dapat ditengarai sebagai etnik Toraja, Mandar, Makassar, Manado, Pamona, Kulawi, Mori, Bungku, Banggai, Saluan, Balantak dan etnik lain yang jumlahnya relatif kecil.

Penduduk kota Palu yang heterogen ini mayoritas menganut agama Islam yaitu 81,19%, Protestan 12,71%, Katolik 2,67%, Hindu 1,03% dan Budha 2,35%. Umumnya penganut agama Islam adalah penduduk asli Kaili dialek Ledo, Tara, Rai dan para pendatang, baik etnik Bugis, Makassar, Mandar, Jawa, Sunda dan Gorontalo. Sedangkan pemeluk agama Kristen dan Katolik berasal dari penduduk asli Kaili dialek Da'a, pendatang Mori, Pamona, Toraja, Kulawi serta Batak, agama Hindu dianut oleh etnik Bali yang urban dari daerah transmigrasi di sekitar Kota Palu sementara agama Budha dianut oleh pendatang etnik Tionghoa.

Dari beberapa kelompok etnik tersebut di atas, mereka membangun pemukiman pada wilayah tertentu dengan menggunakan nama kampung masing-masing seperti Bumi Bahari, Bumi Nyiur, Kamonji. Lere, Ujuna, Lolu, Maesa, Talise, Besusu, Tondo dan sebagainya. Nama-nama pemukiman penduduk tersebut pada umumnya berasal dari nama pohon atau sumberdaya alam disekitarnya. Pemukiman tersebut ada yang dihuni oleh beberapa kelompok etnik dan golongan agama dan ada pula yang dihuni sekelompok etnik lokal (Kaili), kelompok etnik pendatang atau golongan agama tertentu. Persebaran penduduk lokal dan penduduk pendatang pada wilayah tertentu tersebut menunjukkan bahwa terdapat persekutuan hidup kelompok etnik yang terkonsentrasi (koloni) pada

desa atau kelurahan tertentu seperti permukiman orang Minahasa di kampung Maesa, permukiman orang Bugis di kampung Ujuna, orang Toraja berada sepanjang Jalan Kartini Palu dan etnik Jawa banyak berada di seputar jalan Raden Saleh. Demikian pula kelompok etnik lokal (Kaili) ada yang mengelompok pada permukiman tertentu seperti di kampung Talise, kampung Lere, kampung Lolu, kelurahan Poboya, Kavatuna, Buluri, Kobonena dan sebagainya.

Terbentuknya pemukiman penduduk menurut kelompok etnik (koloni) tersebut dapat ditelusuri dari proses terbentuknya permukiman di wilayah tertentu. Sebagaimana lazimnya bahwa kelompok etnik tertentu yang pertama kali menguasai suatu wilayah, maka secara alamiah mereka membangun permukiman di mana warganya masih memiliki hubungan kekerabatan (*gineologis*) antara satu rumah tangga dengan lainnya atau berasal dari rumpun kelompok etnik tertentu sehingga terbentuk permukiman yang bersifat homogen. Namun setelah para migran datang dengan cara membeli tanah penduduk lokal, maka secara perlahan-lahan komposisi penduduk berubah menjadi heterogen. Masyarakat pendatang mudah melakukan adaptasi terhadap penduduk lokal melalui beberapa jalur seperti bahasa, perkawinan, dan mata pencaharian.

A. Orang Bugis di Kota Palu

Bugis merupakan kelompok etnik yang dikenal menjadi penduduk asli jazirah Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat-istiadatnya. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000 yang dianalisis oleh Suryadinata, dkk (2003) populasi orang Bugis sebanyak sekitar enam juta jiwa. Kini orang-orang Bugis menyebar pula di berbagai

provinsi Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Bahkan menurut beberapa ahli demografi menyebutkan bahwa jumlah orang Bugis di luar Sulawesi Selatan lebih besar dibandingkan dengan orang Bugis yang ada di kampung halaman mereka di jazirah Sulawesi Selatan.

Meskipun setiap orang yang beretnik Bugis mengalami pengalaman berbeda dalam hal identitas etnik mereka jika dikaitkan dengan lingkup entitas Palu atau tanah Kaili secara keseluruhan namun penulis ingin menyederhanakan ke dalam empat kategori identitas utama. Hal tersebut terkait dengan bermacam latarbelakang keberadaan orang Bugis di Kota Palu. *Pertama*, orang Bugis yang nenek moyang mereka telah lahir di daratan Sulawesi Tengah. Mereka yang dalam kategori ini adalah orang yang masih mengaku Bugis tetapi telah mengalami asimilasi karena perkawinan nenek moyang atau orang tua mereka dengan penduduk setempat, kendati masih mempraktekkan sebagian kecil adat-istiadat dan hanya mengerti sedikit kosa kata bahasa Bugis. Asal usul mereka tidak lagi mereka ketahui, misalnya daerah asal nenek moyang mereka di tanah Bugis atau Sulawesi Selatan. Nenek moyang mereka bisa jadi datang ratusan tahun sebelumnya, dan identifikasi sebagai orang Bugis hanya merujuk pada beberapa ciri-ciri yang masih tersisa pada keluarga dan kerabat mereka, bisa jadi melalui

nama khas, adat-istiadat atau makanan khas. *Kedua*, Orang Bugis yang lahir di Kota Palu dari kedua orang tua yang berasal dari daerah Bugis. Pada kategori ini, ikatan emosional dengan tanah Bugis masih sangat kuat, bisa saja ditandai dengan kunjungan rutin ke kampung halaman setiap ada hajatan besar, misalnya pesta perkawinan kerabat dekat, syukuran menunaikan ibadah haji dan sekali-sekali ketika lebaran tiba. Mereka masih berbahasa Bugis dengan fasih meskipun telah mampu juga berbahasa Kaili, mengerti dan masih mempraktekkan adat-istiadat pada saat-saat tertentu. *Ketiga*. Orang Bugis yang lahir di Sulawesi Selatan yang lantas pindah ke Palu karena mengikuti orang tua bertugas sebagai pegawai atau orang tua yang datang untuk berdagang, mencari lahan garapan baru sebagai petani, nelayan dan tukang. Atau bahkan mereka yang datang pada saat telah remaja dan dewasa untuk bekerja, sekolah atau membuka usaha perdagangan. *Keempat*. Orang Bugis yang datang dan menetap ke Palu karena alasan pernikahan. Baik yang menikah dengan penduduk asli Palu, Kaili, orang Bugis yang telah menetap di Palu atau etnik lainnya tetapi telah menetap di Palu (Lampe, 2012).

B. Stereotip dan Prasangka Antar Etnik Kaili dan Bugis

1. Malas vs Pekerja Keras

Salah satu sifat yang sering disematkan pada etnik Kaili oleh orang luar etnik tersebut adalah sifat pemalas. Stereotipe terhadap etnik Kaili tersebut,

secara umum dapat ditemukan dari para etnik pendatang yang bermukim di Kota Palu. Masih banyak orang Bugis yang mempersepsi orang Kaili sebagai etnik yang malas bekerja sehingga sulit berkembang secara ekonomi dan politik. Banyak ungkapan yang bisa menunjukkan stereotipe ini mengemuka pada etnik Bugis, misalnya ketika seorang anak muda yang bangun kesiang dan tidak segera pergi ke tempat kerja sering disebut "makkedo to Kaili" (berlaku seperti orang Kaili, Bahasa Bugis yang berarti berlaku seperti orang Kaili, untuk menunjuk perilaku malas dan lamban dalam memulai pekerjaan. Banyak etnik lain yang menganggap orang-orang pedesaan Kaili, suka berlama-lama duduk dibalai-balai di depan rumah mereka menikmati kopi hingga menjelang siang, lalu memulai bekerja. Sementara orang Bugis dianggap lebih rajin dengan bangun subuh, berangkat ke sawah dan ladang lebih pagi dan pulang lebih sore). Hal ini juga berlaku pada perempuan Kaili, mereka sering dianggap malas karena hanya membersihkan beras ketika hendak di tanak, berbeda dengan orang Bugis yang sejak gabah sudah digiling menjadi beras langsung dibersihkan lalu disimpan dalam tempat beras.

Anggapan bahwa etnik Kaili malas bukan hanya datang dari etnik luar, tetapi juga dari mereka sendiri (pandangan *in group*). Penulis seringkali mendengarkan ceramah atau pidato tokoh masyarakat Kaili yang menekankan pentingnya kerja keras jika ingin berkembang dan maju seperti etnik lain serta meninggalkan kebiasaan malas itu. Otokritik dan motivasi itu sering didengungkan ketika menghadapi situasi persaingan dunia kerja dan kompetisi ekonomi dengan etnik yang dianggap pendatang terutama orang Bugis. Meski demikian

sejatinya pada sektor-sektor formal, bisa jadi stereotipe pemalas ini tidak relevan mengingat adanya ikatan kerja yang jelas terhadap sebuah pekerjaan. Berbeda pada sektor informal misalnya pada bidang perdagangan, pertanian, perkebunan dan nelayan yang memang menuntut etos kerja yang muncul dari watak dan budaya kerja suatu etnis. Menarik pernyataan Bapak MM, salah seorang Antropolog Untad menyatakan bahwa:

”Budaya kerja antara orang Bugis dan Kaili di Kota Palu memang berbeda. Orang Bugis adalah masyarakat yang berlatarbelakang kehidupan pertanian padi dan palawija di daerah asalnya di Sulawesi Selatan. Sektor yang menuntut bekerja sepanjang tahun mulai dari menanam, memelihara, memanen lalu kembali menggarap lahan. Sementara etnik Kaili di lembah Palu ini terbiasa dengan budidaya kelapa sebagai bahan baku kopra sejak jaman dahulu, makanya makanan pokok orang Kaili di jaman dulu adalah jagung dan singkong yang ditanam di sela-sela tanaman kelapa dengan pemeliharaan yang tidak seintensif tanaman padi. Tanaman kelapa sebagai tanaman utama di panen hanya dalam 1 bulan lalu menunggu hingga tiga bulan kemudian untuk memperoleh buah kelapa yang siap panen lagi. Dalam tiga bulan masa tunggu itulah, mereka terbiasa menghabiskan waktu di balai-balai rumah mereka dan sesekali ke kebun.”

Wawancara 8 April 2015, di kampus Universitas Tadulako, Palu

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa bisa jadi memang budaya kerja yang dibentuk oleh alam sejak jaman dahulu telah menyebabkan adanya kebiasaan hidup pada masyarakat Kaili, yang oleh etnik lain dipersepsi

sebagai sifat malas. Sesuatu yang sejatinya memunculkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan etnik lain jika diperhadapkan pada situasi kompetitif misalnya pada sektor dunia usaha yang menuntut etos kerja yang tinggi.

Pada sisi berbeda, orang Bugis di Kota Palu umum dianggap sebagai etnik pekerja keras dan pantang menyerah. Asumsi ini muncul karena keberanian orang Bugis meninggalkan kampung halaman (massompe, Bahasa Bugis, berarti Merantau. Suatu konsep budaya yang sarat nilai, terutama pada anak laki-laki, Sompe adalah suatu bentuk pembuktian keberanian, keperkasaan dan tanggungjawab) untuk mencari kehidupan yang layak diberbagai wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Di mana kebiasaan merantau tersebut atas inisiatif sendiri bukan melalui transmigrasi dan umumnya mereka yang meninggalkan kampung halaman tidak lagi kembali tetapi menetap di daerah rantauan. Orang Bugis memiliki filosofi hidup “siri” (Siri’ berarti malu dalam Bahasa Bugis, merupakan ungkapan filosofi hidup yang menekankan rasa malu jika mengalami kegagalan, melanggar norma adat, dan terutama jika kehormatan dilanggar oleh pihak lain. Dalam konteks perantauan, malu terkait dengan kegagalan di tanah rantau sehingga Orang Bugis diperantauan harus bisa memiliki harta dan kekuasaan) yaitu rasa malu kembali ke kampung jika tidak berhasil di kampung rantauan. Dalam konteks Kota Palu, dan selama berdirinya, etnik Bugis menguasai sektor perdagangan dan ekonomi sehingga anggapan sebagai pekerja keras cukup beralasan.

2. Berwatak Keras

Watak keras yang dimaksudkan ini adalah sikap keras kepala, pantang menyerah dan berani

mengambil resiko. Watak ini umumnya disematkan kepada orang Bugis bahkan mungkin berlaku pada semua etnik di Indonesia bukan hanya oleh orang Kaili. Tetapi dalam konteks Kota Palu, selain makna bernuansa positif dari watak keras ini yang dimaksudkan sebagian orang Kaili adalah seringnya orang Bugis terlibat perkelahian baik sesama maupun dengan etnik Kaili. Etnik Bugis sering dianggap sebagai suku yang menjadi penyebab terjadinya konflik kekerasan.

Watak keras ini juga sering disepadankan dengan kebiasaan orang Bugis yang bicara dengan suara yang keras dan langsung pada tujuan (*to the point*). Meski dalam konteks komunikasi antaretnik seringkali suara keras Orang Bugis tidak jauh berbeda dengan suara orang Kaili. Perbedaannya memang terletak pada persepsi bahwa Bugis berani mengambil resiko terutama dalam hal mempertahankan kehormatan diri dan keluarga.

3. Tidak Suka Merantau

Sangat sulit menemukan orang Kaili yang bermigrasi ke daerah lain di luar Sulawesi Tengah atas dasar tuntutan mencari kehidupan yang lebih layak, terkecuali mereka yang karena pekerjaan sebagai PNS, Polisi, Tentara dan profesi lain yang menuntut perpindahan tempat kerja. Kecelakaan juga berlaku bagi mereka yang berpindah karena alasan pernikahan dengan etnik lain atau alasan menuntut ilmu, di luar itu kelihatannya memang sangat jarang orang Kaili meninggalkan daerah asalnya di Sulawesi Tengah.

Etnik Kaili lebih senang untuk berdiam dalam komunitas sendiri, mereka agak sulit terpisah dengan kelompoknya. Penjelasan mengapa orang Kaili jarang yang merantau tergambar dari wawancara dengan Ed (39 thn) berikut ini;

”Tampaknya kita Orang Kaili ini memang lebih bersifat komunal dan kami agak sulit untuk keluar dari komunitas karena kurang mampu untuk berkompetisi di luar daerah. Saya tidak menyederhanakan demikian, hanya melihat kenyataan, tetapi memang dalam sejarah budaya kami tidak mengenal istilah merantau sebagaimana orang Bugis menyebut “massompe”.

Wawancara 8 April 2015, di kampus Universitas Tadulako, Palu

Massompe (bahasa Bugis) yang berarti merantau. Suatu kebiasaan bagi kebanyakan lelaki Bugis untuk bepergian mencari penghidupan dan berpetualang. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami, mengapa kemudian orang Kaili tidak terbiasa merantau ke luar daerah mereka. Budaya Kaili sejak awal memang tampaknya tidak mengenal istilah rantau sehingga tidak menjadi kebiasaan yang diturunkan kepada generasi muda hingga saat ini. Pada posisi ini, banyak etnis Bugis lalu menganggap etnik Kaili kurang berani, tidak terbiasa berkompetisi dan terikat pada komunitasnya.

4. Bahasa Daerah dan Logat Sebagai Identitas

Identitas etnik ditandai dengan simbol-simbol budaya, bahasa, organisasi serta ideologi mereka. Setiap etnik memiliki identitas yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu guna berinteraksi satu sama lainnya (Eriksen: 1993). Kekhasan etnik secara kultural membuat manusia unik dalam berkomunikasi sekaligus menjadi kajian tersendiri dari para ahli antropologi maupun ahli komunikasi. Salah satu hal yang menonjol dalam interaksi sosial seseorang, terutama dalam konteks komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berbeda etnik adalah

bahasa. Bahasa selain fungsinya sebagai transformator pertukaran makna pesan, fungsi pewarisan nilai-nilai sosial pun begitu menonjol.

Manurut Josua (Harris dan Reilly, 2000) bahasa adalah isu pusat dalam politik etnik. Untungnya itu isu yang mudah untuk dihadapi dibanding dengan isu etnik lainnya sebab bahasa membolehkan multi-identitas. Pengetahuan bahasa bukan merupakan pemberian etnik secara eksklusif atau tetap hampir mirip dengan agama atau ras. Manusia bisa berbicara dalam beberapa bahasa dan berberapa bahasa tersebut hidup berdampingan.

Salah satu ciri yang menjadi atribut yang dapat menegaskan Identitas seseorang dalam konteks ruang publik di Kota Palu adalah bahasa daerah dan logat seseorang. Bahasa daerah yang digunakan pada komunitas-komunitas etnik yang berdiam di Kota Palu memang cukup beragam sebagaimana keragaman etnik di kota ini. Sebagai contoh, ketika kita memasuki pasar-pasar tradisional di Kota Palu seperti di Pasar Masomba, Inpres, Kawatuna, akan jamak kita temukan orang-orang bercakap dengan bahasa Bugis. Hal ini karena di pasar-pasar tersebut kebanyakan para pedagang berasal dari etnik Bugis. Demikian juga ketika kita memasuki wilayah Jalan Pattimura di Maesa akan mudah menemukan masyarakat yang bercakap dengan bahasa Indonesia dengan logat Minahasa (Manado). Tetapi ketika kita memasuki kawasan Lorong Nike Ardila, di Palu Selatan kita akan terbiasa dengan nyanyian tembang Jawa atau orang-orang bercakap dengan bahasa Jawa.

Bahasa menjadi bagian penting sebagai penanda identitas seseorang. Celakanya bahasa juga bisa menjadi arena pertarungan dalam perebutan kekuasaan. Lihatlah bagaimana konflik Srilanka

yang menewaskan ribuan orang akibat dominasi bahasa Tamil dalam pemerintahan padahal mayoritas penduduk bertutur dalam bahasa Sinhala, demikian juga ketegangan antara penutur bahasa Belanda dan bahasa Prancis di Belgia yang menjadi penanda antara wilayah miskin dan wilayah yang lebih maju, sementara pertarungan antara penutur bahasa Perancis dan Bahasa Inggris di Canada bahkan mendorong referendum kemerdekaan pada wilayah yang menuturkan bahasa Prancis, karenanya naskah konstitusi ditulis secara dua sisi dengan dua bahasa.

Perbedaan bahasa dan logat sejatinya tidak akan menjadi masalah jikalau tidak menjadi penanda bagi identitas pembeda yang disematkan pada kelompok tertentu untuk menunjukkan “kami” dan “mereka”, “kitorang” dan “kamorang” atau yang pribumi dan pendatang (*ingroup* dan *outgroup*). Dalam konteks Kota Palu, bahasa atau logat masih menjadi bagian pembeda untuk menunjukkan identitas komunitas. Kendati menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, orang Bugis, Makassar, Jawa, Manado dan etnik lainnya yang bermukim di Kota Palu, akan sangat mudah mengenal mereka melalui logatnya. Dan karenanya mereka akan diidentifikasi sebagai pendatang.

Bahasa dan logat lalu menjadi pembeda dalam banyak kepentingan seseorang. Pada konteks ekonomi bahasa menjadi penanda bahwa pendatang hendaknya tidak terlalu eksploitatif terhadap masyarakat lokal. Pada konteks politik, bahasa atau logat menjadi identitas yang menandakan sejauhmana hak-hak seorang pendatang dalam peran politik, meski secara konstitusi mengatur bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam politik tetapi bahasa bisa menjadi penanda sejauhmana peran seseorang dalam politik. Pun

demikian dalam konteks birokrasi, ketika anda berlogat Bugis, Jawa atau Manado mungkin saja anda begitu sulit menjadi kepala dinas, kendati kompetensi anda lebih unggul dari warga lokal.

Selain itu bahasa dan logat juga bisa menjadi penanda “prestise” seseorang dengan mengasosiasi diri dengan etnik yang dianggap lebih unggul. Ketika seseorang berbicara dalam konteks politik nasional, maka identitas Bugis memiliki “prestise” lebih tinggi dibanding penduduk lokal karena reputasi etnik Bugis dalam politik nasional begitu mencolok. Etnik Bugis dengan populasi diperkirakan hanya kurang dari 5% populasi penduduk Indonesia tetapi mampu menduduki banyak jabatan penting dalam politik dan birokrasi di negeri ini, tentu dengan mengetengahkan bahwa BJ Habibie yang berdarah Bugis pernah menjadi presiden, demikian juga Jusuf Kalla yang telah 2 kali menduduki jabatan wakil presiden.

5. Pendatang dan Orang Asli

Dua kategori identitas tersebut adalah sesuatu yang ajeg, sehingga menjadi bentuk pembeda dalam komunikasi. Isu putra daerah berkorelasi dengan konsepsi pemberdayaan masyarakat lokal yang lalu dipertegas dan dipertajam dengan adanya fanatisme daerah sehingga simbolisasi etnik lokal semakin berkembang di berbagai bidang. Simbolisasi kultural berevolusi menjadi simbolisasi politik lokal yang telah menjadi konsumsi politik bagi kelompok-kelompok elite lokal untuk mendapatkan simpatisan dari etnik sendiri. Isu putra daerah menjadi komoditi politik lokal ini sering mencuat ketika menjelang suksesi kepemimpinan daerah dan pada saat pemilu.

Identitas pendatang yang disematkan kepada siapa saja yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau genealogis dengan etnik lokal di Palu merupakan bentuk proteksi politik yang dilakukan

oleh elit-elit lokal untuk menjaga dan mengembangkan kekuasaan. Tindakan akomodatif dan kompromi oleh elit-elit politik lokal (yang dianggap orang asli) nampaknya dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperluas dan menjangkau elit-elit politik dan sosial masyarakat pendatang. Bisa jadi, alasan kuatnya posisi sosial dan ekonomi sebagian etnik pendatang dianggap sebagai ancaman serius bagi penduduk lokal dalam usaha melestarikan kekuasaan dan pengaruh politik.

Pada sisi ekonomi, pendatang Bugis yang dominan dalam sektor ekonomi telah menyebabkan munculnya beragam stigma baik yang positif dan negatif. Penguasaan sektor ekonomi di Kota Palu oleh etnik Bugis telah melahirkan ungkapan yang cukup menghenyak ketika mereka dianggap sebagai “penjajah”. Kata “penjajah” tersebut sangat berlebihan, namun nyatanya ungkapan itu kadang terdengar bahkan dari orang yang berpendidikan sekalipun. Kata yang bermakna sentimen yang dalam dan menunjukkan kecemburuan sosial yang luar biasa, kendati memang ungkapan ini seringkali bersifat politis.

Sementara pada sisi yang positif, etnik pendatang Bugis sering dianggap sebagai etnik yang pekerja keras dan mudah bergaul sehingga wajar jika mampu menguasai sektor ekonomi. Etnik ini juga dianggap sebagai wiraswastawan yang sangat tangguh bahkan bisa bersaing dengan etnik Cina dan Arab di Palu.

C. Konflik dan Kekerasan Antara Bugis dan Kaili di Kota Palu

Sejarah menunjukkan bahwa konflik kekerasan beberapa kali pernah terjadi yang pemicunya bernuansa konflik etnik. Konflik kekerasan pernah terjadi di tahun 2001 di Pasar Manonda yang

melibatkan etnik Kaili Da'a dengan etnik Bugis karena alasan ketersinggungan, yang berujung pada pembakaran pasar. Namun nuansa yang sebetulnya terjadi adalah karena adanya ketidakseimbangan penguasaan ekonomi (ruang pasar) yang lebih banyak dikuasai etnik Bugis yang merupakan penduduk pendatang.

Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 4 April 1998 di pasar Manonda juga terjadi sebuah peristiwa konflik kekerasan yang cukup penting dengan muatan konflik bernuansa agama. Ketika itu di Pasar Manonda seorang pedagang asal etnik Bugis berjualan bahan-bahan bacaan Islam, seorang polisi asal etnik Toraja beragama Kristen yang bertugas di pasar memberikan teguran kepada pedagang dimaksud agar dapat memindahkan sebagian buku-buku dagangannya karena menurutnya menghalangi para pejalan di pasar yang berujung pada perkelahian. Besoknya terjadi kekerasan terhadap simbol-simbol Toraja dan Kristen secara umum di Kota Palu.

Konflik antara Bugis dan Kaili juga pernah terjadi tahun 2011, melibatkan remaja di Jalan Anoa dan Jl. Babussalam, di Palu Selatan. Perkelahian berlangsung selama 3 hari yang dipicu oleh persoalan saling ejek di facebook, yang kemudian berdampak saling serang dengan isu etnik. Awal tahun 2016, kejadian serupa kembali terulang dan melibatkan kelompok yang sama. Beruntung konflik tidak membesar dan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah daerah dan tokoh adat setempat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara etnik Bugis dan etnis Kaili di Kota Palu sudah berlangsung

sangat lama. Jika ditelusuri lebih jauh, etnis Bugis masuk ke Palu (dahulu masuk wilayah Donggala) telah berlangsung sejak abad ke 17 hingga migrasi orang Bugis belakangan ini. Akibatnya salah satu etnis yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial budaya etnis Kaili adalah etnis Bugis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesamaan adat istiadat, adanya kesamaan beberapa kosakata dalam bahasa Kaili bahkan sebagian orang Kaili juga mengakui masih merupakan keturunan Bugis dan Makassar.

Namun dibalik relasi sosial budaya yang sudah terjalin sejak lama tersebut, dalam konteks komunikasi antarbudaya masih terdapat banyak stereotipe negatif, prasangka yang masing-masing disematkan pada kedua etnis acap kali menyebabkan ketegangan antaretnik. Belakangan bahkan telah terjadi konflik kekerasan yang melibatkan kedua etnis dengan beragam latarbelakang. Akar konflik sebagian besar berlatar kecemburuan sosial ekonomi dan politik yang kemudian merembet menjadi kekerasan yang dipicu seringkali oleh persoalan sepele seperti ketersinggungan perorangan, kenakalan remaja dan masalah kriminal biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, M. J. (1986). *Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia*. NIU: Center for Southeast Asian Studies.
- Aragon, L.V. (2000). *The Colonial Introduction of Religion and Language as Ethnicity in Sulawesi, Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Terjemahan Nining I Susilo. Jakarta: UIP.
- Brown, R. (2005). *Prejudice; Menangani*

“Prasangka” dari Perspektif Psikologi Sosial.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Eriksen, T., H. (1993). *Ethnicity and Nationalism (anthropological perspective)* London: Pluto Press.

Harris, P., & Reilly, B. ed. (2000) *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. (diterjemahkan oleh LP4M). Cetakan pertama, 2000. AMEEPRO.

Isaacs, H. R. (1993). *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis (Identitas Kelompok dan Perubahan Politik)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lampe, I. (2010). Identitas Etnik Dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran*. 8 (3).

Lampe, I (2012). *Konstruksi Identitas Politisi Beretnis Bugis dalam Komunikasi Politik di Kota Palu*. Dalam buku *Komunikasi Budaya dan Jurnalisme Warga*. Riau: ALAF.

Liliweri, A, (2005). *Prasangka dan Konflik*. Jogjakarta: LkiS.

Liliweri, A. (2007). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Jogjakarta: LkiS.

Maunati, Y. (2007). *Identitas Dayak (Komodifikasi dan Politik Kebudayaan)*. Yogyakarta: LkiS.

Mulyana, D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nordholt, H. S. ed. (2005). *Outward Appearances: Trend, Identitas dan Kepentingan*. (diterjemahkan M. Imam Azis). Yogyakarta: LKiS – KITLV.

Nordholt, H. S., VanKlinken, G., & Karang-Hoogenboom, I. ed. (2007) *Politik Lokal Indonesia*. Jakarta: KITLV – YOI.

Posner, D. N. (2005). *Institution and Ethnic Politics in Africa*. New York: Cambridge University Press.

Samovar, L. A., Porter, R. E. dan McDaniel, E. R., (2014). *Komunikasi Lintas Budaya (Terjemahan)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Suryadinata, L. A., Nurvida, E., & Ananta, A. (2003). *Penduduk Indonesia; Etnisitas dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES

Susiyanto. (2006). *Integrasi dan Perubahan Identitas Kelompok Etnik Jawa, Minangkabau, Melayu, Lembak, Rejang dan Serawai dalam Kerangka Etnisitas (Studi di Kota Bengkulu)*. Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Padjajaran. Disertasi, Universitas Padjajaran

Wade, C. & Tavris, C. (2010) *Psychology* (10th Edition). Pearson.